

ANALISIS PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI PULAU GILI IYANG KABUPATEN SUMENEP

Nuris Syarifatul Imamiyah, Ainur Rofieq*, Mohammad Syaifuddin

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*Email: rofieq@umm.ac.id

Abstract: This study was qualitative study using descriptive approach. The data of study was obtained through interview, researcher observation, and documents study. The interview data was collected from state elementary schools' headmasters and teachers in Bancamara, Gili Iyang island. The observation sheets were based on researcher' direct participation during classroom activities held by teachers. While the data of document study was taken from teachers' and students' number and attendance list, syllabus, and also lesson plan. Then the data was analyzed using the interactive model, a concept from Miles and Huberman. This study used sources triangulation for its validity checking. While the results showed that teaching plan, which consisted of planning, implementing, and evaluating process, was arranged and applied. In general, the learning problems happened in Gili Iyang island were the teachers' work-placement; imbalance number of teachers; public transportation issues; number of schools; and also, the teachers' salary issues. The strategies applied to overcome those problems were maintaining good relationship and way of communicating among teachers; recruiting *fresh graduates*; applying a family-friendly approach to comfort those honorary teachers; making a regular schedule to keep teachers attending school; applying a working day of 50 percent plus 1 day from total number of effective days in a month; applying an internal policy in school in terms of allocating the school fund for honorary teachers' welfare; and having the teachers familiar teaching more than one class at the same day.

Keywords: Learning Problems; State Elementary Schools; Island.

Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis (1) problematika pembelajaran yang terjadi pada sekolah dasar negeri di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep? (2) mendeskripsikan strategi yang diterapkan untuk mengatasi problematika pembelajaran pada sekolah dasar negeri di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data wawancara diperoleh dari kepala sekolah dan guru-guru di sekolah dasar negeri di Desa Bancamara pulau Gili Iyang sebagai informan. Lembar observasi didasarkan pada pengamatan langsung peneliti terkait proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Data untuk studi dokumen diperoleh dari data jumlah guru, jumlah siswa, presensi kehadiran guru dan siswa, silabus dan juga RPP. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles and Huberman. Kemudian untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi. Jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pembelajaran, secara umum, yang terjadi di pulau Gili Iyang adalah distribusi guru yang belum merata, ketimpangan jumlah guru honorer dan pegawai negeri, faktor transportasi, jumlah sekolah, dan tunjangan kesejahteraan. Strategi yang diimplementasikan guna mengatasinya adalah menjaga baik komunikasi antar guru, merekrut *fresh graduate* yang merupakan penduduk asli pulau Gili Iyang, mengupayakan pendekatan secara kekeluargaan untuk membuat nyaman para guru honorer sehingga memperkecil niat untuk berhenti mengajar, membuat piket masuk secara bergantian guna mengupayakan tetap ada guru yang hadir ke sekolah, memberlakukan hari kerja sebanyak 50 persen plus 1 hari dari jumlah total hari efektif dalam satu bulan, memberlakukan kebijakan internal sekolah sehubungan dengan alokasi dana BOS untuk kesejahteraan guru honorer, dan membiasakan para guru berstatus honorer dan pegawai negeri untuk siap mengajar lebih dari satu kelas.

Kata kunci: Problematika Pembelajaran; Sekolah Dasar Negeri; Pulau.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, luas wilayah laut Indonesia totalnya adalah 5,9 juta km², yang terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif. Luas tersebut belum termasuk landas kontinen (Lasabuda, 2013). Kepulauan adalah sebutan untuk kumpulan pulau-pulau atau gugusan beberapa buah pulau. Negara kepulauan adalah negara yang wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan. Terdapat 45 negara yang digolongkan sebagai negara kepulauan dari 193 negara berdaulat yang telah diakui oleh Internasional dan menjadi anggota PBB.

Kondisinegarayangpulaunya tersebar luas, besar kemungkinan akan menghadapi masalah dalam hal distribusi. Terkait dengan bidang pendidikan, distribusi guru yang belum merata merupakan persoalan penting yang ada di Indonesia. Distribusi guru SD, misalnya. Jumlah guru di daerah-daerah dengan kondisi kecil, sulit, dan terpencil berbeda dengan guru di kota. Padahal, jumlah guru SD tidaklah sedikit. Berdasarkan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Kemenristekdikti pada tahun 2015, dari 37 Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) negeri dan 378 LPTK swasta, tercatat sebanyak 91.247 lulusan yang dihasilkan. Perbedaan tersebut berimbas pada proses belajar mengajar (Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2015). Lebih jauh lagi, problematika yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Rata-rata hasil belajar siswa SD di kota besar umumnya jauh lebih tinggi daripada siswa di daerah terpencil.

Kehadiran seorang guru di kelas sangat penting artinya, apalagi di tingkat sekolah dasar. Dalam Undang-undang Guru dan Dosen (UU No 14 Tahun 2005, 2005)

disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, guru memegang peranan sebagai sutradara sekaligus aktor dan merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar di kelas (Sutarmanto, 2015).

Seorang guru harus mengacu pada standar ketentuan yang telah ditetapkan ketika menjalankan tugasnya. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Tahapan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar Proses yang dimaksud, meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran (Depdiknas, 2006).

Kabupaten Sumenep merupakan satu dari empat kabupaten yang ada di pulau Madura. Dilansir dari laman pemerintah Kabupaten Sumenep, terdapat 126 pulau di kabupaten yang terletak di ujung timur Madura tersebut. Satu diantaranya adalah pulau Gili Iyang. Secara administratif, pulau ini termasuk dalam kecamatan Dungkek. Ada dua desa yang terdapat di pulau ini, yakni desa Banraas dan desa Bancamara. Terdapat lima sekolah dasar negeri di pulau tersebut. Dua sekolah berlokasi di

desa Banraas dan sisanya berada di desa Bancamara. Berdasarkan pengamatan awal peneliti pada tahun 2012, akses menuju pulau Gili Iyang bisa ditempuh selama kurang lebih satu jam perjalanan darat dari pusat kota Sumenep dengan jarak 28 km. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan transportasi air selama 50 menit. Lama tempuh selama menggunakan transportasi air bergantung pada kondisi cuaca yang terjadi.

Guru berstatus pegawai negeri yang ditempatkan di pulau Gili Iyang hampir sebagian besar berasal dari luar pulau. Selama hari kerja, para guru bermukim di rumah sewa dan tinggal berjauhan dari keluarga. Karenanya, para guru akan membutuhkan lebih dari sehari untuk bisa bertemu dengan keluarga. Tidak hanya itu, jam operasional transportasi air yang ada juga terbilang belum mendukung. Berdasarkan pengamatan awal peneliti pada tahun 2012, perahu motor sebagai satu-satunya sarana menuju ke pulau Gili Iyang, beroperasi sebanyak dua kali. Keberangkatan pertama pada sekitar jam 06.00 WIB dari Gili Iyang, dan bertolak dari pelabuhan di kecamatan Dungkek sekitar jam 12.00 WIB. Sedangkan perahu motor pada jam operasional kedua berangkat pada jam 11.00 WIB, dan bertolak pada jam 14.00 WIB dari pelabuhan yang sama. Di luar jam tersebut, masyarakat dikenai biaya yang lebih tinggi untuk bisa menumpang perahu motor. Kondisi ini tidak memungkinkan bagi para guru di pulau Gili Iyang untuk bisa berangkat dan bertolak pada hari yang sama untuk mengajar dan kembali ke rumah.

Seorang guru yang ditugaskan di sebuah pulau akan dihadapkan pada dua pilihan, memenuhi jam kerja sebagaimana mestinya dengan konsekuensi tinggal berjauhan dan jarang bertemu keluarga, atau bisa bertemu keluarga setiap minggunya tetapi meninggalkan siswanya. Bila pilihan kedua yang menjadi prioritas seorang guru,

konsekuensinya pemenuhan jam mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Persentase ketidakhadiran guru akan menimbulkan problematika pembelajaran. Salah satunya, jumlah kehadiran guru dalam satu sekolah yang tidak sebanding dengan jumlah kelas yang harus menerima pelajaran, akan membuat seorang guru harus mengajar lebih dari satu kelas dalam waktu yang bersamaan. Bila hal tersebut terjadi, maka tahapan proses pembelajaran seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran juga akan menimbulkan problematika tersendiri. Problematika pembelajaran pada umumnya bersifat kompleks, sedangkan kompleksitas tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor utama, yakni: pengaruh budaya, pengaruh sejarah, hambatan praktis, karakter guru sebagai pembelajar, karakter siswa, dan proses belajar (Budyartati, 2014).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana problematika pembelajaran yang terjadi pada sekolah dasar negeri di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep? (2) Apa strategi yang diterapkan untuk mengatasi problematika pembelajaran pada sekolah dasar negeri di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pembelajaran sekolah dasar negeri di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep dan strategi yang diterapkan untuk mengatasinya. Problematika pembelajaran yang diteliti didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Makna adalah data yang sebenarnya. Maka, hasil pada penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, bukan pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Permasalahan penelitian telah dirumuskan sebelumnya, dengan fokus penelitian pada analisis problematika pembelajaran sekolah dasar negeri di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep, didasarkan pada Standar Proses sesuai Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 sebagai acuannya. Melalui metode ini, peneliti diharapkan bisa mendeskripsikan dan menganalisis problematika pembelajaran yang terjadi dan strategi yang diterapkan dalam mengatasinya, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar wawancara, lembar observasi, dan lembar studi dokumen.

Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif. Analisis ini mengikuti konsep dari Miles and Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian hingga tuntas, hingga data jenuh (Sugiyono, 2011). Analisis dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Sekolah Dasar Negeri di Pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep

Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku

sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku hasil belajar sifatnya berkelanjutan, fungsional, positif, aktif, dan juga terarah. Proses perubahan tingkah laku dapat terjadi dalam berbagai kondisi berdasarkan penjelasan dari ahli Pendidikan dan psikologi (Hanafy, 2014).

Proses pembelajaran seringkali dihadapkan pada permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut dikenal sebagai problematika pembelajaran. Problematika pembelajaran merupakan berbagai permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit, atau bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Problematika pembelajaran pada umumnya bersifat kompleks. Kompleksitas tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor utama, yakni: pengaruh budaya, pengaruh sejarah, hambatan praktis, karakter guru sebagai pembelajar, karakter siswa, dan proses belajar (Budyartati, 2014).

Belum banyaknya penelitian yang mengkaji permasalahan yang ada pada sekolah-sekolah di daerah kepulauan, mungkin disebabkan karena akses menuju lokasi yang tidak mudah. Seringkali permasalahan pendidikan di kepulauan dianggap sama dengan permasalahan pendidikan pada umumnya sehingga luput dari perhatian (Adlim, Gusti, & Zulfadli, 2016).

Pulau Gili Iyang secara administrasi berada dalam kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Di pulau yang memiliki luas wilayah 921,2 Ha tersebut, terdapat dua desa, yakni desa Banraas dan desa Bancamara. Desa Bancamara memiliki wilayah yang lebih luas yakni 514,92 Ha dan penduduk yang lebih banyak, dibandingkan desa Banraas. Di desa Bancamara juga terdapat lebih banyak sekolah dasar berstatus negeri. Desa Banraas memiliki dua sekolah dasar negeri, sedangkan di desa Bancamara terdapat tiga sekolah dasar negeri, ditambah satu sekolah dasar Islam dan tiga madrasah ibtidaiyah. Penelitian difokuskan pada tiga sekolah

dasar negeri yang ada di desa Bancamara, yakni SDN Bancamara 1, SDN Bancamara 2, dan SDN Bancamara 3. Di sekolah dasar negeri tersebut, dua dari tiga kepala sekolahnya merupakan penduduk asli dan berdomisili di pulau Gili Iyang.

Berdasarkan hasil penelitian, data guru sekolah dasar negeri di Desa Bancamara yang berstatus pegawai negeri dan honorer, baik yang berasal dari pulau maupun luar pulau Gili Iyang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Guru Desa Bancamara

Keterangan	SDN Bancamara 1	SDN Bancamara 2	SDN Bancamara 3
Kepala Sekolah	Bukan penduduk asli pulau Gili Iyang.	Penduduk asli pulau Gili Iyang.	Penduduk asli pulau Gili Iyang.
Jumlah guru berstatus pegawai negeri (termasuk kepala sekolah)	3 orang	2 orang	4 orang
Jumlah guru berstatus honorer	4 orang	7 orang	4 orang
Jumlah guru berasal dari pulau	4 orang (1 orang berstatus pegawai negeri dan 3 orang berstatus honorer)	8 orang (1 orang berstatus pegawai negeri dan 7 orang berstatus honorer)	5 orang (1 orang berstatus pegawai negeri dan 4 orang berstatus honorer)
Jumlah guru berasal dari luar pulau	3 orang (2 orang berstatus pegawai negeri dan 1 orang berstatus honorer)	1 orang (berstatus pegawai negeri)	3 orang (berstatus pegawai negeri)
Total jumlah guru (termasuk kepala sekolah)	7 orang 7 orang*	9 orang 7 orang*	8 orang 6 orang*

Perbedaan total jumlah guru di SDN Bancamara 2 dan SDN Bancamara 3, sebagaimana terlihat pada Tabel 1, diakui oleh kepala sekolah masing-masing karena belum semua guru dimasukkan dalam program data. Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan peneliti, papan yang berisi data guru maupun siswa yang dipajang di dinding kantor sekolah,

terutama untuk data jumlah guru dan siswa, belum diperbaharui sepenuhnya. Untuk itu, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2, perbandingan jumlah guru dan siswa dalam satu sekolah serta kurikulum yang digunakan, diperoleh melalui wawancara dengan masing-masing kepala sekolah dasar negeri di desa Bancamara Gili Iyang.

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Guru dengan Siswa

Keterangan	SDN Bancamara 1	SDN Bancamara 2	SDN Bancamara 3
Jumlah guru (termasuk kepala sekolah)	7 orang	9 orang	8 orang
Jumlah siswa	32 orang	62 orang	39 orang
Kurikulum yang dipakai	Kurikulum 2013 untuk kelas 1-4 sejak tahun 2018. Kelas 5 dan 6 menggunakan KTSP.	Kurikulum 2013	Kurikulum 2013

Berdasarkan Tabel 2, dilihat dari jumlah siswa dalam satu sekolah dasar negeri, tidak banyak jumlah guru yang dibutuhkan. Akan tetapi, bila dilihat dari jumlah tingkatan kelas yang ada, dibutuhkan setidaknya satu orang guru untuk mengajar satu tingkatan kelas. Latar belakang kebutuhan ini didasarkan pada persiapan guru untuk mengajar, sehingga berimbas pada kelancaran proses pembelajaran yang akan dilalui. Seorang guru diharapkan dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melaksanakan tugasnya di kelas. Salah satu isi Standar Proses tersebut adalah mengenai kesiapan guru terkait dengan tahapan pembelajaran yang akan dilakukan. Tahapan tersebut yakni perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran.

Tahap perencanaan pembelajaran ditujukan untuk melihat persiapan seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP tersebut dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses, disebutkan bahwa setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis (Depdiknas, 2006). Tujuan penyusunan RPP agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Data yang dihimpun peneliti melalui wawancara dengan kepala sekolah di tiga sekolah dasar negeri pada desa Bancamara, silabus

dan RPP adalah acuan bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun dalam proses penyusunannya, diakui oleh salah satu kepala sekolah, dilakukan oleh pihak luar sekolah.

Silabus dan RPP wajib dimiliki oleh setiap guru. Ketika sewaktu-waktu ada kunjungan dari dinas terkait, guru diharapkan bisa menunjukkan RPP yang dimiliki, walaupun terkadang dalam proses pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan isi RPP tersebut. Disadari oleh kepala sekolah tersebut, ketidaksesuaian pelaksanaannya dikarenakan kondisi di sekolah yang memang mengharuskan seperti itu.

Pada saat penelitian dilakukan, pihak sekolah sedang mempersiapkan proses akreditasi yang akan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan hasil studi dokumen melalui RPP yang dimiliki oleh ketiga sekolah dasar negeri tersebut, didapatkan bahwa RPP sudah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema, yang komponennya terdiri dari: (a) Identitas sekolah; (b) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema; (c) Kelas/semester; (d) Materi pokok; (e) Alokasi waktu; (f) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD; (g) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; (h) Materi pembelajaran; (i) Metode pembelajaran; (j) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran; (k) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan; (l) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan (m) Penilaian hasil pembelajaran (Depdiknas, 2006).

Setelah tahap perencanaan pembelajaran dilakukan, guru akan masuk pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Tahap pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 mengenai Standar Proses, pelaksanaan pembelajaran tersebut mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup (Depdiknas, 2006).

Pada kegiatan pendahuluan, seorang guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberi motivasi belajar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Kemudian guru akan masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran.

Tahapan selanjutnya adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi. Hal-hal yang masuk dalam evaluasi adalah: (a) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; (b) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; (c) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan (d) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti di SDN Bancamara 3, jumlah guru yang hadir sebanyak empat orang. Terdiri dari satu kepala sekolah, dua guru berstatus pegawai negeri, dan satu guru berstatus honorer. Karena kepala sekolah tidak mendapat tugas mengajar,

maka tiga orang guru mengajar enam kelas di sekolah tersebut.

Kondisi yang serupa juga terjadi di SDN Bancamara 1. Karena ketidakhadiran beberapa orang guru, mengharuskan guru yang hadir pada saat itu untuk mengajar dua kelas. Namun, berbeda halnya dengan SDN Bancamara 2. Berhubung sebagian guru di sekolah tersebut berasal dari pulau Gili Iyang, maka jumlah guru yang hadir lebih banyak dibandingkan kehadiran guru pada dua sekolah lainnya. Perbedaan antara ketiga sekolah ini membuat tahapan pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam RPP.

Secara garis besar, di SDN Bancamara 1 dan SDN Bancamara 3, kegiatan pendahuluan dalam pelaksanaan pembelajaran sudah dilakukan berdasarkan RPP yang telah tersedia. RPP disusun untuk digunakan di masing-masing tingkat kelas. Ketimpangan jumlah guru yang hadir dengan jumlah siswa dan tingkatan kelas yang ada, membuat seorang guru harus mengajar lebih dari satu kelas. Maka tidak jarang RPP tidak sepenuhnya dijadikan acuan ketika proses pembelajaran. Guru harus bisa berimprovisasi terkait dengan seberapa banyak waktu yang akan digunakan. Dalam proses pembelajaran, hambatan praktis yang seringkali ditemui adalah guru dibatasi waktu, sumber, fasilitas, undang-undang, dan aturan yang harus diindahkan. Terkadang guru juga dibatasi idealismenya dalam belajar dan pembelajaran oleh kekakuan birokrasi dan manajemen (Budyartati, 2014).

Ketika seorang guru diharuskan mengajar dua kelas namun dengan alokasi waktu yang terbatas, tidak jarang akan ada bagian-bagian dalam RPP yang akan terlewat. Mata pelajaran, dua tingkatan kelas, dan juga materi yang disampaikan menjadi alasan utama mengapa alokasi waktu berjalan tidak sesuai dengan RPP.

Sementara itu di SDN Bancamara 2, proses pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai

dengan RPP yang disusun. Faktor jumlah guru yang lebih banyak dibandingkan dua sekolah dasar negeri lainnya, dan juga delapan dari sembilan guru SDN Bancamara 2 berasal dari pulau Gili Iyang, bisa dipastikan hampir setiap harinya masing-masing kelas terisi seorang guru. Tidak ada kendala terkait alokasi waktu dalam tahapan kegiatan pendahuluan, inti, maupun penutup. Ketiga tahapan kegiatan tersebut juga dilalui sebagaimana RPP yang disusun sebagai acuan. Setelah proses pelaksanaan pembelajaran dilalui, selanjutnya akan masuk pada penilaian proses pembelajaran.

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaiannya digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan pembelajaran, pengayaan, atau pelayanan konseling. Hasil tersebut juga digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan.

Penilaian pembelajaran yang dilakukan saat proses pembelajaran menggunakan: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Sedangkan penilaian pembelajaran yang dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir proses pembelajaran menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil penilaian akhir diperoleh dari gabungan penilaian proses dan penilaian hasil pembelajaran. Penilaian pembelajaran tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 mengenai Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Melalui penilaian pembelajaran, siswa terdorong untuk belajar lebih giat, sedangkan guru terdorong untuk lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan mendorong sekolah untuk lebih meningkatkan fasilitas dan kualitas manajemen sekolah (Widoyoko Tayibnapi, 2000).

Berdasarkan hasil wawancara, tiga

sekolah dasar negeri di desa Bancamara melakukan penilaian pembelajaran selama proses pembelajaran dan di akhir proses pembelajaran. Penilaian pembelajaran didapat dari tes tulis berupa ulangan harian, yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

Berdasarkan hasil studi dokumen, berupa RPP dari ketiga sekolah dasar negeri tersebut, di bagian penilaian pembelajaran memuat beberapa komponen. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 mengenai Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang didalamnya memuat tentang penilaian pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran didasarkan pada Indikator Pencapaian Kompetensi. Teknik penilaiannya berupa tes lisan dan tes tulis, dengan bentuk instrumennya menggunakan uraian ataupun isian. Kriteria penilaian diperoleh dari tiga hal, yakni produk (hasil diskusi yang mencakup konsep), performansi (mencakup kerjasama dan partisipasi), dan lembar penilaian. Nilai siswa diperoleh dari jumlah skor, yang dibagi dengan jumlah skor maksimal, kemudian dikalikan 10 (Depdiknas, 2006).

Problematika yang terjadi di sekolah dasar negeri di desa Bancamara terletak bukan hanya pada penyusunan RPP yang dilakukan oleh pihak luar sekolah, tetapi juga pada pelaksanaan isi RPP. Pelaksanaan pembelajaran cenderung mengabaikan alokasi waktu. Hal tersebut terjadi karena seorang guru bisa jadi mengajar lebih dari satu kelas. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh jumlah guru yang ada dalam satu sekolah.

Ketidakhadiran guru disebabkan oleh banyak hal. Misalnya, jarak tempuh dari tempat asal ke sekolah. Tidak semua guru merupakan penduduk asli desa Bancamara. Berdasarkan data yang termuat di Tabel 1 Data Guru Sekolah Dasar Negeri di Desa Bancamara Gili Iyang, menunjukkan bahwa 2/3 dari total jumlah guru berstatus pegawai

negeri di desa tersebut, tidak berdomisili di pulau Gili Iyang. Para guru tersebut memiliki suami atau istri yang bekerja dan menetap di daratan.

Kehadiran seorang guru di kelas sangat penting artinya, apalagi di tingkat sekolah dasar. Dalam proses belajar mengajar, guru memegang peranan sebagai sutradara sekaligus aktor. Guru juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran di kelas (Sutarmanto, 2015).

Ketidakhadiran para guru karena faktor jarak tempat tinggal ke sekolah, seyogyanya menjadikan guru merefleksi kembali tanggung jawab yang berkaitan dengan profesinya. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karenanya, seorang guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin (Mulyasa, 2009).

Seorang guru yang menjalankan tugasnya dengan baik disebut guru yang profesional. Profesionalisme guru adalah sikap profesional yang berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan, sebagai profesi, dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka (Tilaar dan Nugroho, 2008). Profesionalisme juga diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya (Ali Muhson, 2004).

Berkenaan dengan ketidakhadiran guru di sekolah, kebijakan harus diambil para kepala sekolah dasar negeri di desa Bancamara pulau Gili Iyang. Salah satu upaya yang ditempuh HS, kepala sekolah SDN Bancamara 1, adalah dengan menjaga komunikasi antar guru apabila ada yang tidak bisa hadir di sekolah. Hal penting lainnya adalah mengupayakan tetap ada

guru yang masuk, minimal 3-4 orang. Konsekuensinya memang seorang guru mengajar akan dua kelas. Prinsip HS, sekolah harus tetap berjalan, bagaimanapun kondisinya.

Permasalahan lain yang muncul adalah ketidakhadiran guru honorer yang sebagian besar merupakan penduduk asli pulau Gili Iyang. Kepala sekolah SDN Bancamara 1 mengakui bahwa kesejahteraan guru honorer belum sepenuhnya terjamin. Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah untuk gaji guru honorer hanya 15 persen untuk setiap tiga bulan. Kalau dikalkulasikan, dengan tanggungan keluarga, bisa jadi kurang mencukupi. Ini yang menyebabkan guru honorer mencari tambahan pendapatan lainnya (di luar).

Di satu sisi, kepala sekolah SDN Bancamara 1 berharap pembelajaran bisa berjalan optimal. Tapi dengan pendapatan guru honorer yang hanya sekian, kepala sekolah tidak bisa mengharapkan hal yang lebih. Distribusi guru di pulau Gili Iyang memang terlihat kurang. Ditinjau dari segi jumlah guru yang ada dan total jumlah siswa, pertimbangan pemerintah (terkait) mungkin didasarkan pada dua hal. Pertama, satu orang guru untuk satu kelas. Kedua, satu guru untuk 20 orang siswa.

Banyaknya jumlah guru honorer di SDN Bancamara 2 membuat kepala sekolah harus bijak dalam mengelola dana BOS, terutama untuk alokasi kesejahteraan guru honorer. Diakui ID, hal tersebut adalah hal yang berat. Bila diharuskan mengikuti aturan BOS, akan terasa dilematis karena guru honorer juga harus mendapat perhatian. Selayaknya juga dijadikan pertimbangan, apakah jumlah gaji honorer yang diterima manusiawi atau tidak.

Keberhasilan proses pembelajaran terletak pada kepiawaian guru. Guru tidak akan mampu memberikan proses belajar mengajar yang optimal apabila manajemen sekolah tidak memberikan dukungan yang memadai terhadap pelaksanaannya.

Kurang optimalnya proses pembelajaran juga disebabkan oleh faktor kurikulum tidak siap, sarana dan prasarana tidak memadai, atau bahkan mungkin guru yang kurang piawai dalam menyampaikan ilmu (Budyartati, 2014)

Kebutuhan ekonomi setiap orang berbeda. Kebutuhan guru honorer yang sudah berkeluarga berbeda dengan yang belum berkeluarga. Ketika gaji guru honorer dirasa belum mencukupi, pasti memunculkan alasan untuk berhenti mengajar. Dukungan dari sekolah diperlukan guna kelancaran proses pembelajaran yang optimal. Untuk itu, perlu adanya pendekatan kekeluargaan, agar guru honorer membatalkan niatnya. Kepala sekolah SDN Bancamara 2 menuturkan, upaya tersebut ditempuh demi siswa.

Kegiatan pembelajaran merupakan proses komunikasi. Komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar bisa terjadi apabila pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan (Azis, 2014). Untuk bisa menyampaikan pesan dengan baik, seorang guru harus mengacu pada peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru terdiri dari 9 Bab dan 68 pasal. Pada bab IV, tercantum penjabaran mengenai Beban Kerja Guru yang mencakup beberapa kegiatan pokok. Kegiatan pokok guru tersebut adalah beban kerja guru yang dilaksanakan minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu. Sekolah dengan jumlah guru berlebihan akan mengakibatkan guru tidak dapat memenuhi kewajiban mengajarnya. Sedangkan sekolah dengan jumlah guru yang kurang akan mengakibatkan beban mengajar guru semakin berat (Sudarsono, 2015).

Faktor kekurangan guru menjadi penyebab ditutupnya SDN Bancamara 4. Selain itu, secara umum, permasalahan yang terjadi di pulau Gili Iyang adalah jumlah sekolah dasar yang cukup banyak.

Dengan total tujuh sekolah dasar di desa Bancamara, seyogyanya menjadi pertimbangan apakah sudah memenuhi syarat atau tidak.

Walaupun tidak menampik bahwa setiap tahunnya ada persaingan guna mendapatkan siswa baru, kepala sekolah SDN Bancamara 2 berpendapat bahwa memilih lokasi belajar itu hak setiap wali siswa. Dengan banyaknya jumlah sekolah dasar di pulau Gili Iyang, kepala sekolah yang dulunya pernah mengajar di SDN Bancamara 4 tersebut mengungkapkan bahwa tampilan yang ditunjukkan pada masyarakat menjadi nilai tersendiri. Tampilan yang dimaksud berupa transparansi maupun kegiatan-kegiatan sekolah, misalnya pramuka dan keikutsertaan dalam lomba seni.

Dibandingkan dengan SDN Bancamara 1 dan SDN Bancamara 3, rata-rata guru SDN Bancamara 2 merupakan penduduk asli pulau Gili Iyang. Hal tersebut memperkecil kemungkinan bagi para guru untuk tidak hadir mengajar ke sekolah, kecuali karena latar belakang ekonomi sebagai guru honorer.

Lebih lanjut, kepala sekolah SDN Bancamara 2 menambahkan bahwa guru honorer di pulau Gili Iyang tidak sama dengan guru honorer di kota. Guru honorer di kota sifatnya membantu guru pegawai negeri. Guru honorer di sekolah pulau Gili Iyang tugasnya sekaligus sebagai guru kelas. Jadi, bukan lagi sekedar membantu guru pegawai negeri. Bila kepala sekolah diwajibkan mengikuti aturan, misalnya guru honorer tidak hadir ke sekolah selama tiga hari, sanksinya harus bersedia dilepas. Hal itu yang dirasa kepala sekolah SDN Bancamara 2 tidak bisa diberlakukan di sekolah tersebut.

Selain itu, menurut kepala sekolah SDN Bancamara 2, masih ada orangtua yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak. Contoh kasus, ketika orangtua berdagang ke luar provinsi, terkadang

anak juga dibawa. Resikonya, pasti anak tidak masuk sekolah. Akan dimaklumi kalau durasi tidak masuk sekolah hanya beberapa hari saja. Biasanya, hal tersebut berlangsung selama sebulan atau bahkan lebih.

Kondisi yang demikian, diakui kepala sekolah SDN Bancamara 3, menyebabkan keberadaan RPP hanya terkesan sebagai pajangan saja. RPP tetap ada dan dijadikan acuan, rambu-rambunya tetap diperhatikan. Karena diburu waktu, yang terjadi di lapangan memang banyak kekurangan. Akan ada bagian-bagian yang terlampaui (terlewati).

Selain itu, jumlah siswa baru yang mendaftar sekolah merosot tiap tahunnya. Penyebab yang pertama, karena ada beberapa orang tua yang mampu secara finansial untuk menyekolahkan anaknya ke luar pulau Gili Iyang, ke sekolah-sekolah yang dirasa lebih maju daripada di pulau Gili Iyang. Yang kedua, faktor jumlah lembaga yang setara dengan sekolah dasar negeri ada banyak. Persaingan terbilang ketat untuk mendapatkan siswa setiap tahunnya.

Kaitannya dengan dana BOS yang dialokasikan untuk gaji honorer, secara aturan seharusnya hanya 15 persen saja. Tetapi di SDN Bancamara 3, kepala sekolah menetapkan sebanyak 20 persen. Anggarannya untuk tiga bulan, tetapi penyalurannya untuk tiap bulan. Maka, ada pos lainnya yang dikurangi. Memang menyalahi aturan, diakui oleh kepala sekolah SDN Bancamara 3, tetapi menurutnya ini demi kesejahteraan guru honorer. Dengan begitu, diharapkan guru honorer tetap mau masuk dan mengajar.

Dana BOS yang dikeluarkan jumlahnya tetap, hanya saja alokasinya lebih banyak diberikan pada guru honorer yang lebih rajin masuk dan mengajar di sekolah. Jadi, kebijakan tersebut diharapkan bisa memotivasi guru untuk lebih rajin.

Pemberlakuan kebijakan yang

berbeda dengan sekolah lain, pernah ditempuh SDN Bancamara 3 terhadap guru berstatus pegawai negeri yang presensi kehadirannya sedikit. Guru berstatus pegawai negeri yang berhalangan hadir, dikenakan kontribusi setiap harinya. Besarnya nominal kontribusi tersebut sudah disepakati bersama. Kontribusi tersebut dialokasikan bagi guru honorer yang hadir di sekolah. Diakui oleh kepala sekolah SDN Bancamara 3, kebijakan tersebut sempat berjalan lancar. Namun, pasti tersimpan kekurangan dibalik setiap kebijakan yang diterapkan. Salah satunya adalah fakta bahwa besarnya sisa gaji yang diterima guru berstatus pegawai negeri, ternyata masih jauh lebih besar daripada sejumlah nominal yang harus dibayarkan sebagai kontribusi pengganti ketidakhadiran. Hal ini menyebabkan kebijakan internal SDN Bancamara 3 tersebut tidak diterapkan lagi.

Ada kesepakatan dan ketentuan tersendiri terkait kontribusi tersebut. Ketentuannya adalah guru pegawai negeri harus memenuhi 50 persen plus 1 hari dari jumlah total hari efektif dalam satu bulan. Kalau tidak bisa memenuhi jam kerja tersebut, baru ada kontribusi yang diberikan. Jadi tidak serta-merta gaji dipotong untuk kontribusi begitu saja. Secara garis besar, dari hasil penelitian yang dilakukan, problematika pembelajaran yang terjadi di tiga sekolah dasar negeri di pulau Gili Iyang adalah sebagai berikut:

- a) Distribusi guru di pulau Gili Iyang masih kurang. Terutama guru yang berstatus pegawai negeri. Jumlah guru dalam satu sekolah berpengaruh pada kelancaran proses pembelajaran di dalam kelas.
- b) Ketidakhadiran guru yang tidak berdomisili di pulau Gili Iyang juga mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran. Hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab dan kedisiplinan guru. Seorang guru yang mengajar lebih dari satu kelas, merupakan hal

- yang biasa terjadi di pulau tersebut.
- c) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tetap dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas guru. Akan tetapi, ada bagian-bagian yang terlewat karena kondisi guru yang diharuskan mengajar dua kelas, bahkan lebih.
- d) Lebih banyak guru berstatus honorer daripada guru pegawai negeri dalam satu sekolah. Kepala sekolah membuat kebijakan dengan merekrut guru honorer yang merupakan penduduk sekitar, guna memenuhi kebutuhan akan jumlah guru. Perekrutan penduduk sekitar dimaksudkan agar tetap ada guru yang bisa hadir ke sekolah, tanpa alasan faktor cuaca maupun keterbatasan transportasi air.
- e) Belum memadainya jam operasional transportasi air yang tersedia menyebabkan guru non-penduduk pulau terkadang tidak hadir ke sekolah.
- f) Dengan luas administrasi 514,92 Ha, terdapat tiga sekolah dasar berstatus negeri, satu sekolah dasar Islam, dan tiga madrasah ibtidaiyah di desa Bancamara. Bila dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk dan luasnya desa, total jumlah sekolah dasar negeri dan swasta terlalu banyak.
- g) Jumlah sekolah dasar yang terlalu banyak, mempengaruhi jumlah siswa yang masuk ke sekolah dasar negeri setiap tahunnya.
- h) Jumlah siswa baru setiap tahunnya berpengaruh pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang 15 persennya dialokasikan untuk kesejahteraan guru honorer per tiga bulan sekali. Semakin banyak jumlah siswa dalam satu sekolah, maka semakin besar pula dana BOS yang didapat. Begitu juga sebaliknya.
- i) Karena jumlah guru honorer lebih banyak daripada guru pegawai negeri, sedangkan dana BOS yang didapat tergantung pada jumlah siswa, maka setiap guru honorer mendapatkan tunjangan kesejahteraan dengan kisaran Rp 200.000 – Rp 250.000 untuk per bulannya. Ini termasuk kebijakan kepala sekolah, dengan tidak berpatokan pada aturan pengalokasian dana BOS.
- j) Karena alasan pada poin (i), guru honorer biasanya mencari tambahan pendapatan lainnya di luar sekolah, salah satunya dengan berdagang. Aktivitas berdagang inilah yang kerap kali membuat guru tidak hadir di sekolah. Guru biasanya berdagang ke luar provinsi.
- k) Selama tahun 2014-2016 ada tunjangan kepulauan bagi para guru honorer. Besarannya Rp 1.500.000 per bulan, dan dicairkan untuk periode tiga bulan sekali. Semenjak tunjangan kepulauan dicabut, melatarbelakangi alasan guru honorer untuk berdagang. Tunjangan kepulauan dicabut karena pulau Gili Iyang dianggap bukan termasuk daerah kepulauan lagi. Pulau Gili Iyang dikategorikan sebagai daratan. Secara geografis dan kehidupan masyarakatnya, pulau Gili Iyang belum bisa dimasukkan dalam kategori daratan, karena belum terdapat fasilitas layaknya di daratan, seperti bank, kantor pos, puskesmas, dan kantor pemerintahan lainnya.

Problematika pembelajaran dapat ditelusuri dari jalannya pembelajaran. Sementara keberhasilan pembelajaran dapat ditelusuri dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh faktor-faktor, yakni *input*, proses, dan *output*. Komponen *input* terdiri dari Dinas Pendidikan, guru, siswa, manajemen sekolah, dan lingkungan. Lingkungan adalah kondisi masyarakat

sekitar sekolah.

Merujuk pada hasil penelitian, problematika pembelajaran yang terjadi di pulau Gili Iyang dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya. Problematika yang bersumber dari Dinas Pendidikan antara lain: (a) Distribusi guru di pulau Gili Iyang masih kurang; (b) Lebih banyak guru berstatus honorer daripada guru pegawai negeri dalam satu sekolah; (c) Total jumlah sekolah dasar negeri dan swasta terlalu banyak; (d) Jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah dasar negeri setiap tahunnya; dan (e) Dicabutnya tunjangan kepulauan bagi guru honorer. Sementara problematika yang bersumber dari guru, adalah: (a) Ketidakhadiran guru yang tidak berdomisili di pulau Gili Iyang; (b) Beberapa bagian dalam RPP terlewat pelaksanaannya; dan (c) Guru tidak hadir ke sekolah karena kerap berdagang ke luar provinsi.

Sedangkan problematika yang bersumber dari manajemen sekolah, antara lain: (a) Ketidakhadiran guru yang tidak berdomisili di pulau Gili Iyang; (b) Guru mengajar lebih dari satu kelas; (c) Beberapa bagian dalam RPP terlewat pelaksanaannya; (d) Jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah dasar negeri setiap tahunnya; dan (e) Alokasi dana BOS untuk kesejahteraan guru honorer. Dan problematika yang bersumber dari lingkungan adalah belum memadainya jam operasional transportasi air yang tersedia.

Problematika pembelajaran terjadi karena beberapa faktor utama, yakni: pengaruh sejarah, pengaruh budaya, hambatan praktis, karakter guru, karakter siswa, dan proses belajar (Budyartati, 2014). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah di desa Bancamara Gili Iyang Sumenep, tidak muncul problematika pembelajaran yang bersumber dari pengaruh sejarah, pengaruh budaya, serta karakter siswa.

Penelitian yang mengangkat permasalahan pendidikan yang terjadi di daerah kepulauan belum banyak ditemui.

Selain karena alasan akses menuju lokasi yang tidak mudah, seringkali permasalahan yang terjadi di daerah kepulauan dianggap sebagai permasalahan umum yang juga terjadi di daerah daratan lainnya. Hal ini yang membuat permasalahan di daerah kepulauan luput dari perhatian (Adlim et al., 2014).

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan di daerah adalah kekurangan guru berkualitas (Mulkeen & Chen, 2008), faktor kemiskinan dan latar belakang orang tua siswa (Lyson et al., 2006), sikap metrosentrik yang dimiliki oleh beberapa guru (Campbell & Yates, 2011). Sikap metrosentrik adalah sikap yang selalu berorientasi pada hidup di perkotaan dan menolak untuk hidup di pedesaan (Campbell & Yates, 2011).

Penelitian mengenai permasalahan pendidikan yang terjadi daerah kepulauan pernah dilakukan oleh Adlim, Helida Gusti, dan Zulfadli sebagaimana termuat dalam Jurnal Pencerahan terbitan September 2016. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa permasalahan yang terjadi di pulau Nasi Aceh adalah sebagian besar guru berdomisili di Banda Aceh, sehingga guru yang ditugaskan mengajar tidak setiap hari bisa hadir di sekolah. Ketidakhadiran guru di sekolah menyebabkan materi pelajaran tidak dapat disampaikan seluruhnya selama per semester.

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di desa Bancamara pulau Gili Iyang, selain karena distribusi guru yang kurang merata, faktor ketidakhadiran guru di sekolah juga menjadi problematika selama proses pembelajaran. Distribusi guru yang kurang merata ditandai dengan adanya ketimpangan jumlah guru berstatus pegawai negeri antara SDN Bancamara 1, SDN Bancamara 2, dan SDN Bancamara 3. Sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 3, yang datanya diperoleh dari hasil wawancara dengan masing-masing kepala sekolah dasar negeri tersebut.

Tabel 3. Distribusi Guru ke Sekolah

Keterangan	SDN Bancamara 1	SDN Bancamara 2	SDN Bancamara 3
Jumlah guru pegawai negeri	3 orang	2 orang	4 orang
Jumlah siswa	32 orang	62 orang	39 orang

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, walaupun distribusi guru pegawai negeri kurang merata di pulau Gili Iyang, tidak ada alokasi penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk formasi guru sekolah dasar. Hal tersebut bisa dipantau dari laman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Sementara itu, faktor ketidakhadiran guru di sekolah disebabkan karena guru tidak berdomisili di pulau Gili Iyang. Guru tersebut bukan penduduk asli pulau, dan memiliki suami atau istri yang bekerja dan menetap di daratan. Dari wawancara dengan ketiga kepala sekolah dasar negeri di desa Bancamara, berdasarkan Tabel 1, diperoleh hasil bahwa 2/3 dari total guru pegawai negeri yang ditugaskan di desa Bancamara Gili Iyang tidak berdomisili di pulau Gili Iyang. Sebagaimana hasil penelitian yang pernah dilaporkan oleh Campbell dan Yates (Campbell & Yates, 2011), salah satu keunikan guru di daerah adalah sikap metrosentrik. Sikap metrosentrik adalah selalu berorientasi hidup di perkotaan dan menolak tinggal di pedesaan (Campbell & Yates, 2011). Rendahnya minat guru mengajar di daerah, selain karena faktor sikap metrosentrik yang ditunjukkan, juga disebabkan oleh minimnya akses transportasi (Vito & Krisnani, 2017).

Strategi dalam Mengatasi Problematika Pembelajaran Sekolah Dasar Negeri di Pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep

Mengatasi problematika yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, bisa ditempuh melalui berbagai alternatif penyelesaian. Untuk mengatasi problematika

pembelajaran sekolah dasar negeri yang terjadi di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep, ada beberapa strategi yang ditempuh sekolah berdasarkan kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN Bancamara 1, SDN Bancamara 2, dan SDN Bancamara 3, strategi tersebut diantaranya:

- 1) Menjaga baik komunikasi antar guru, berkaitan dengan kehadiran guru di sekolah guna kelancaran proses pembelajaran. Upaya ini dimaksudkan untuk menghindari kurangnya tenaga guru yang akan mengisi materi di setiap kelas.
- 2) Merekrut *fresh graduate* menjadi guru honorer. *Fresh graduate* atau lulusan terbaru ini merupakan penduduk asli pulau Gili Iyang. Upaya tersebut ditempuh kepala sekolah SDN Bancamara 2. Dilatarbelakangi oleh hanya tersedianya dua orang guru berstatus pegawai negeri di sekolah dasar tersebut, membuat kepala sekolah masih menerapkan strategi ini. Diharapkan dengan ditempuhnya strategi tersebut, bisa mengupayakan tidak ada kelas yang tidak diisi oleh seorang guru setiap harinya. Perekrutan lulusan terbaru yang merupakan penduduk asli pulau, dimaksudkan untuk minimalis ketidakhadiran guru ke sekolah karena alasan cuaca dan terbatasnya jam operasional transportasi air.
- 3) Mengupayakan pendekatan secara kekeluargaan. Strategi ini ditempuh oleh kepala sekolah SDN Bancamara 2 dengan tujuan membuat nyaman para guru honorer. Di SDN Bancamara 2, jumlah guru honorer jauh lebih banyak daripada guru berstatus pegawai negeri. Setiap guru honorer di sekolah tersebut juga sekaligus merupakan guru kelas. Besaran gaji honorer didasarkan pada dana BOS

yang diterima dan besarnya dana BOS tergantung pada jumlah siswa pada sekolah tersebut. SDN Bancamara 2 memang memiliki lebih banyak siswa dibandingkan SDN Bancamara 1 dan SDN Bancamara 3. Namun, jumlah guru honorer di SDN Bancamara 2 juga lebih banyak daripada dua sekolah dasar negeri lainnya. Besarnya jumlah gaji yang diterima guru honorer SDN Bancamara 2 seringkali memunculkan niat untuk berhenti mengajar dan mencari pekerjaan lain. Pendekatan secara kekeluargaan ditempuh kepala sekolah SDN Bancamara 2 agar para guru honorer mengurungkan niatnya.

- 4) Membuat piket masuk secara bergantian. Strategi ini pernah ditempuh SDN Bancamara 3 guna mengupayakan tetap ada guru yang hadir ke sekolah. Namun, strategi ini tidak berlangsung lama, karena total jumlah gurunya pun tidak memadai.
- 5) Memberlakukan hari kerja sebanyak 50 persen plus satu hari dari jumlah total hari efektif dalam satu bulan. Strategi ini diberlakukan oleh kepala sekolah SDN Bancamara 3 karena strategi yang pernah ditempuh sebelumnya, sebagaimana pada poin (d), tidak berlangsung lama. Misal, pada satu bulan terdapat 26 hari efektif. Maka setiap guru diwajibkan hadir ke sekolah sebanyak 50 persen plus satu hari, yakni 14 hari kerja. Sama halnya dengan poin (d), strategi ini dimaksudkan untuk mengupayakan tetap ada guru yang hadir ke sekolah. Konsekuensi bagi guru yang tidak memenuhi kehadiran 50 persen plus satu hari ini, akan terkena kontribusi sebagaimana termuat pada poin (f).
- 6) Menerapkan pengadaan kontribusi bagi guru berstatus pegawai negeri yang berhalangan hadir ke sekolah.

Kontribusi sebesar Rp 100.000,- per hari tidak hadir, dikenakan bagi setiap guru pegawai negeri. Strategi ini pernah diberlakukan di SDN Bancamara 3, walaupun sudah tidak diterapkan lagi karena dirasa kurang efektif.

- 7) Memberlakukan kebijakan internal sekolah sehubungan dengan alokasi dana BOS untuk kesejahteraan guru honorer. Tiga sekolah dasar negeri di desa Bancamara pulau Gili Iyang menerapkan hal yang sama terkait hal ini. Alokasi dana BOS yang seyogyanya 15 persen per tiga bulan untuk semua guru honorer di setiap sekolah, dirasa kurang menopang kesejahteraan guru honorer. Maka kebijakan yang diambil oleh masing-masing kepala sekolah dasar negeri tersebut adalah dengan menaikkan alokasi 15 persen menjadi 20 persen per tiga bulannya, atau dua kali lipat setiap bulannya, untuk besaran gaji honorer yang diterima oleh guru.
- 8) Membiasakan para guru, baik yang berstatus honorer maupun pegawai negeri, untuk siap mengajar lebih dari satu kelas setiap harinya. Strategi ini ditanamkan oleh masing-masing kepala sekolah dasar negeri di desa Bancamara Gili Iyang sebagai upaya terakhir, apabila strategi pada poin-poin sebelumnya tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Strategi ini sebagai alternatif jika ternyata jumlah guru yang hadir tetap saja tidak sesuai dengan banyaknya tingkatan kelas yang harus diisi.

Berdasarkan sumber problematika pembelajaran yang terjadi di pulau Gili Iyang, strategi yang diterapkan oleh kepala sekolah dikelompokkan menjadi tiga. Strategi untuk problematika yang bersumber dari dinas pendidikan adalah: (a) Merekrut *fresh graduate* menjadi guru

honorar; dan (b) Memberlakukan kebijakan internal sekolah sehubungan dengan alokasi dana BOS untuk kesejahteraan guru honorar.

Sementara untuk problematika yang bersumber dari guru, strategi yang diterapkan antara lain: (a) Menjaga baik komunikasi antar guru; (b) Mengupayakan pendekatan secara kekeluargaan; (c) Membuat piket masuk secara bergantian; (d) Memberlakukan hari kerja sebanyak 50 persen plus satu hari dari jumlah total hari efektif dalam satu bulan; dan (e) Menerapkan pengadaan kontribusi bagi guru berstatus pegawai negeri yang berhalangan hadir ke sekolah.

Sedangkan strategi yang diterapkan untuk problematika pembelajaran yang bersumber dari manajemen sekolah, adalah: (a) Memberlakukan kebijakan internal sekolah sehubungan dengan alokasi dana BOS untuk kesejahteraan guru honorar; dan (b) Membiasakan para guru untuk siap mengajar lebih dari satu kelas setiap harinya.

Mengatasi problematika yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, bisa ditempuh melalui berbagai alternatif penyelesaian. Berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adlim (Adlim et al., 2016), didapatkan alternatif penyelesaian sebagai berikut: (1) Menyediakan perahu bermotor khusus dan gratis bagi para guru yang mengajar ke pulau; (2) Mempertegas peraturan atau hukuman bagi para pelanggar disiplin; (3) Mengirimkan tenaga pengajar berstatus kontrak daripada PNS, karena lebih tepat dan lebih efektif dalam hal penertibannya; dan (4) Mengangkat guru kontrak asli pulau menjadi guru berstatus PNS.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan: Problematika pembelajaran di sekolah dasar negeri yang terdapat di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep disebabkan oleh empat faktor, yakni

faktor dari Dinas Pendidikan, manajemen sekolah, guru, dan juga lingkungan. Strategi yang diimplementasikan guna mengatasi problematika pembelajaran yang terjadi di sekolah dasar negeri di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep, antara lain: (a) Strategi untuk problematika yang bersumber dari dinas pendidikan; (b) Strategi untuk problematika yang bersumber dari guru; (c) Strategi untuk problematika yang bersumber dari manajemen sekolah

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan beberapa saran untuk Dinas Pendidikan, manajemen sekolah, dan juga guru, sehubungan dengan problematika pembelajaran yang terjadi pada sekolah dasar negeri di pulau Gili Iyang Kabupaten Sumenep: Menempatkan guru berstatus pegawai negeri secara merata. Data guru di setiap sekolah sudah diunggah dalam laman Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi kekurangan tenaga guru seyogyanya bisa tergambar jelas. Atau, mengangkat guru honorar yang merupakan penduduk asli pulau Gili Iyang untuk menjadi pegawai negeri sipil. Dengan demikian, kebutuhan akan guru bisa terpenuhi. Ketidakhadiran guru di sekolah karena faktor kurang disiplinnya guru bisa diminimalkan dengan mempertegas kembali aturan yang berlaku. Alternatif lainnya bisa dengan mengupayakan penyediaan transportasi air yang jam operasionalnya memungkinkan bagi para guru non-penduduk pulau Gili Iyang bisa berangkat dan kembali ke rumah dalam waktu tempuh di hari yang bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adlim, Gusti, H., & Zulfadli. (2016). Pendidikan di daerah kepulauan (Studi kasus di SMA Negeri 1 Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Pencerahan*.

- Adlim, M., S, S., Ali, H., Ibrahim, A., Umar, H., Ismail, K., ... Yasin, B. (2014). Assessing chemistry-learning competencies of students in isolated rural senior high schools by using the national examination: a case study of Simeulue Island, Indonesia. *International Journal of Science and Mathematics Education*. <https://doi.org/10.1007/s10763-013-9440-x>
- Ali Muhson. (2004). Meningkatkan Profesionalisme Guru: Sebuah Harapan. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*.
- Azis, A. (2014). Kompetensi Guru Dalam Penggunaan Media Dengan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pelopor Pendidikan*.
- Budyartati, S. (2014). *Problematika Pembelajaran di SD*. Yogyakarta: Deepublish.
- Campbell, A. M., & Yates, G. C. R. (2011). Want to be a country teacher? No, I am too metrocentric. *Journal of Research in Rural Education*.
- Depdiknas, 2006. (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun 2006*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Hanafy, S. M. (2014). Konsep Belajar dan Pembelajaran. *Lentera Pendidikan*. [https://doi.org/10.1016/0020-7403\(87\)90047-6](https://doi.org/10.1016/0020-7403(87)90047-6)
- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2015). Pangkalan data perguruan tinggi. Retrieved from <https://forlap.ristekdikti.go.id/>
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Maritime Economy*. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.11.209>
- Lyson, T. A., Flora, C. B., Flora, J. L., Spears, J. D., Swanson, L. E., Lapping, M. B., & Weinberg, M. L. (2006). Rural Communities: Legacy and Change. *Contemporary Sociology*. <https://doi.org/10.2307/2074627>
- Mulkeen, A., & Chen, D. (2008). Teachers for Rural Schools. Experiences in Lesotho, Malawi, Mozambique, Tanzania, and Uganda. *In Teacher*.
- Mulyasa, E. (2009). *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sudarsono. (2015). Analisis Kebijakan Pemenuhan Beban Kerja Guru SMA Negeri di Tarakan. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 3(1).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Sutarmanto. (2015). KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME GURU. *Jurnal Tabularasa*.
- Tilaar, H,A,R.dan Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan Pengantar untuk memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka.
- UU No 14 Tahun 2005, R. (2005). Undang-undang Guru dan Dosen. Produk Hukum. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0174-2991\(08\)63816-1](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0174-2991(08)63816-1)
- Vito, B., & Krisnani, H. (2017). Kesenjangan pendidikan desa dan kota. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13533>
- Widoyoko Tayibnapi, F. Y. (2000). Evaluasi Program Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.